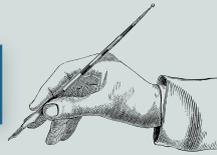




BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021



SIMAK  BPK RI



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 secara tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2021, yang penyusunannya didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengukuran kinerja tersebut diukur berdasarkan 13 Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Tahun 2021 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Dengan mendasarkan pada indikator kinerja tersebut, maka LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Selain untuk mengukur optimalisasi pelaksanaan kinerja Tahun 2021, kami juga berharap LAK Tahun 2021 ini dapat menjadi umpan balik bagi seluruh Pejabat Struktural dan para pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 28 Januari 2022
Kepala Perwakilan

Agus Priyono
NIP 197204211998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4
D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	9
E. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUE</i>)	21
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	22
A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	22
B. PERJANJIAN KINERJA (PK)	27
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. PENCAPAIAN SKOR INDIKATOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021	29
B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SKOR INDIKATOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	33
C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	63
D. REALISASI SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN.....	63
E. REALISASI ANGGARAN	65
BAB IV - PENUTUP	68
LAMPIRAN.....	v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Persebaran Agama dan Jenis Kelamin.....	10
Tabel 2 SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.....	10
Tabel 3 SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.....	11
Tabel 4 Rincian Anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP).....	12
Tabel 5 Rincian Anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP).....	13
Tabel 6 Revisi Anggaran atas Sasaran Strategis Tahun 2021.....	28
Tabel 7 Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.....	32
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	35
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Terhadap Target Jangka Menengah.....	36
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	37
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 Terhadap Target Jangka Menengah.....	38
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	38
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Terhadap Target Jangka Menengah.....	40
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	41
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 Terhadap Target Jangka Menengah.....	42
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	43
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 Terhadap Target Jangka Menengah.....	43
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	44
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 Terhadap Target Jangka Menengah.....	45
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	46
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 Terhadap Target Jangka Menengah.....	47
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	48
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Terhadap Target Jangka Menengah.....	48
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	49
Tabel 25 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Terhadap Target Jangka Menengah.....	51
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	52
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Terhadap Target Jangka Menengah.....	54
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	55
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 Terhadap Target Jangka Menengah.....	55
Tabel 30 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	56
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Terhadap Target Jangka Menengah.....	57
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir.....	59
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Terhadap Target Jangka Menengah.....	62
Tabel 34 Indikator Kinerja Keluaran beserta Anggaran dan Realisasi Tahun 2021.....	64
Tabel 35 Anggaran dan Realisasi RKP Tahun 2021.....	66
Tabel 36 Anggaran dan Realisasi RKSP Tahun 2021.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	5
Gambar 2 SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	9
Gambar 3 SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	9
Gambar 4 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	14
Gambar 5 Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	15
Gambar 6 Rumah Jabatan Kepala Perwakilan	15
Gambar 7 Rumah Jabatan Struktural Eselon III	16
Gambar 8 Rumah Jabatan Struktural Eselon IV	16
Gambar 9 Musholla BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	17
Gambar 10 Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	17
Gambar 11 Kantin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	18
Gambar 12 Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4	19
Gambar 13 Genset dan Lift BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	19
Gambar 14 Akses Jalan Rumah Jabatan	20
Gambar 15 Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024	25
Gambar 16 Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024	25
Gambar 18 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024	26
Gambar 19 Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	27
Gambar 20 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	46
Gambar 21 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	50

BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka diperlukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021. Sementara itu, untuk penerapan di lingkungan internal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dengan Keputusan Sekjen BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada unit-unit kerja Pelaksana BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu satuan kerja pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI yang mengelola anggaran. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan cerminan dari prestasi kerja yang telah dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2021. Tujuan dari penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tertuang dalam ketentuan Pasal 616 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

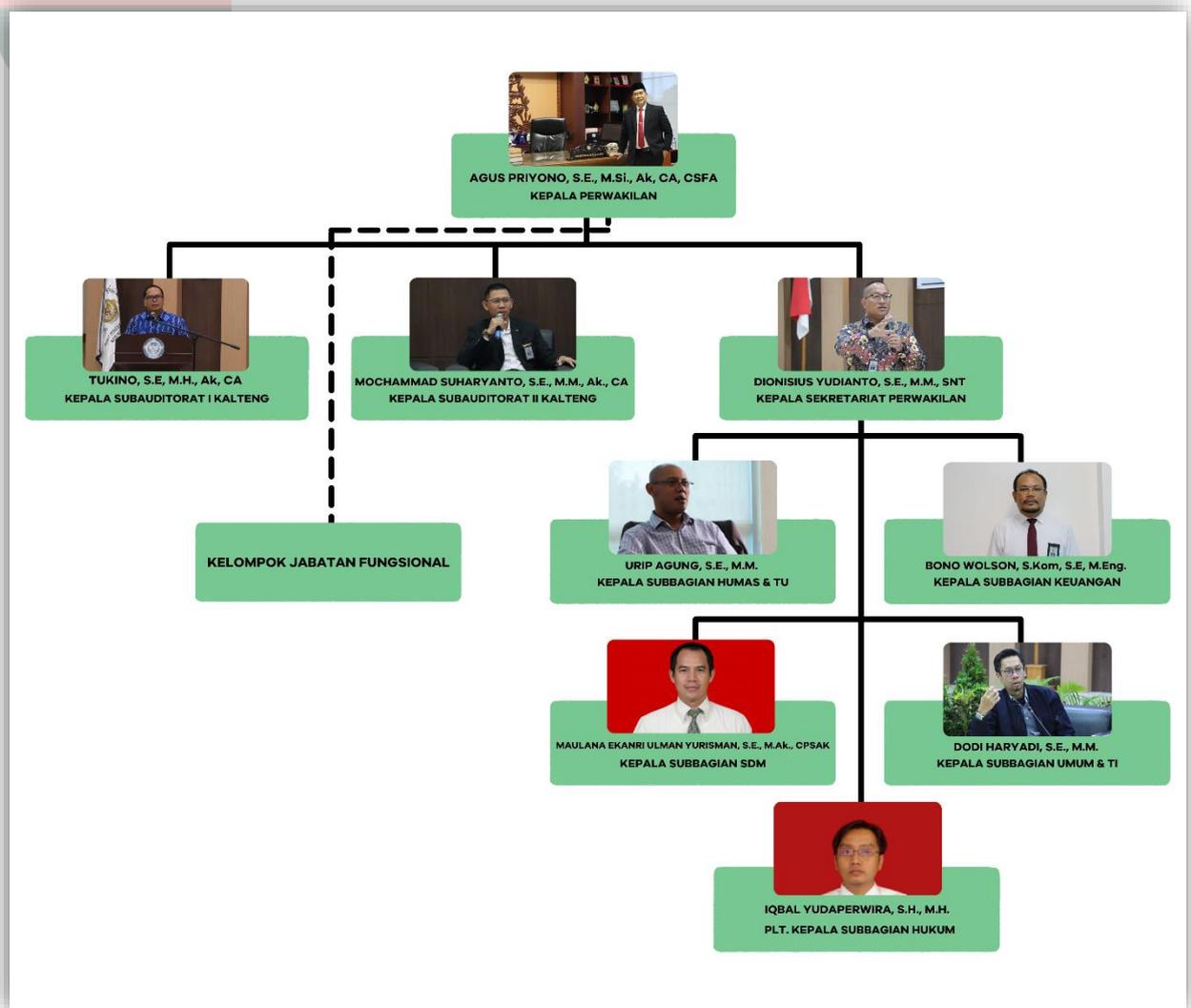
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan pasal 615 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan pada pasal (1) yang menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI dan pasal (2) yang menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala.

Berikut struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Adapun tugas dalam struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Subauditorat Kalimantan Tengah I

Subauditorat Kalimantan Tengah I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD , dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. Merumuskan rencana kegiatan;
2. Mengusulkan tim pemeriksa;
3. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
5. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
7. Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
9. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
12. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Subauditorat Kalimantan Tengah II

Subauditorat Kalimantan Tengah II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito

Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD , dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. Merumuskan rencana kegiatan;
2. Mengusulkan tim pemeriksa;
3. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
5. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
7. Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
9. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
12. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Sumber Daya Manusia

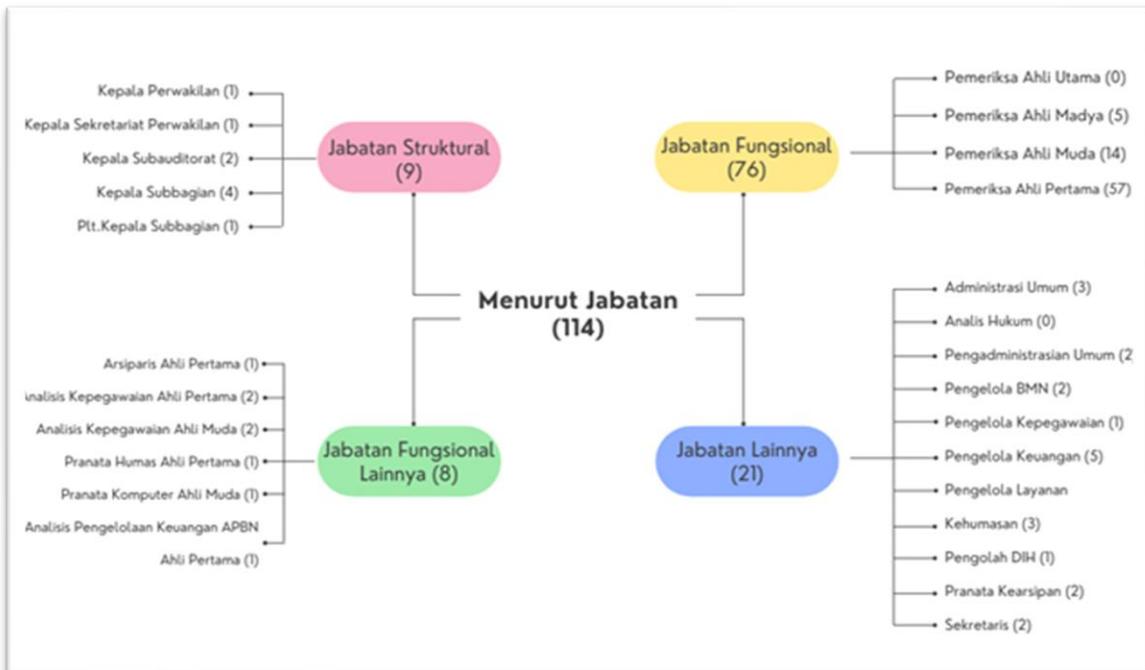
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2021 sebanyak 114 orang yang terbagi menjadi:

a. Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa



Gambar 2 SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

c. Berdasarkan Kelompok Jabatan



Gambar 3 SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

d. Persebaran Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Agama			Jenis Kelamin	
	Islam	Katolik	Protestan	Laki-Laki	Perempuan
Struktural	7	1	1	9	
Subauditorat Kalteng I	31	2	4	20	17
Subauditorat Kalteng II	28	4	7	23	16
Subbagian Humas dan TU Kalan	5	1		1	5
Subbagian Hukum	1		1	1	1
Subbagian SDM	3		2		5
Subbagian Keuangan	6	1	1	4	4
Subbagian Umum dan TI	8			4	4
SUB TOTAL	89	9	16	62	52
TOTAL	114			114	

Tabel 1 SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Persebaran Agama dan Jenis Kelamin

e. Persebaran Berdasarkan Rentang Usia

Unit Kerja	Rentang Usia							
	< 25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55
Struktural						3	4	2
Subauditorat Kalteng I	2	14	7	6	1	5	2	
Subauditorat Kalteng II	3	20	4	2	3	1	1	
Subbagian Humas dan TU Kalan	1			3	1	1		
Subbagian Hukum	1	1						
Subbagian SDM		2	1	2				
Subbagian Keuangan	2	2	3	1				
Subbagian Umum dan TI	1	2	2	2	1			
SUB TOTAL	10	41	22	16	9	11	5	0
TOTAL	114							

Tabel 2 SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

f. Persebaran Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						
	SMK	D - 2	D - 3	D - IV	S - 1	S - 2	S - 3
Struktural						4	
Subauditorat Kalteng I				1	33	3	
Subauditorat Kalteng II				1	35	3	
Subbagian Humas dan TU Kalan			1		5		
Subbagian Hukum			1		1		
Subbagian SDM			1		4		
Subbagian Keuangan			2		5	1	
Subbagian Umum dan TI	1		3		3	1	
SUB TOTAL	1	0	8	2	86	12	0
TOTAL	114						

Tabel 3 SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

2. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp22.395.333.000,- yang terdiri dari anggaran untuk kegiatan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sejumlah Rp9.316.701.000,00 dengan target 286 keluaran dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sejumlah Rp13.078.632.000,00 dengan target 26 keluaran. Adapun rincian anggaran RKP dan RKSP tersebut dijabarkan dalam tabel-tabel berikut.

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
1	1043.FAF.036	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	3.898.944.000	26 LHP
a.		<i>LHP Keuangan</i>	1.963.970.000	14 LHP
b.		<i>LHP Kinerja</i>	1.114.461.000	8 LHP
c.		<i>LHP DTT</i>	820.513.000	4 LHP

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
2	1043.FAF.071	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	227.579.000	146 LHP
3	1043.FAF.251	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	2.954.230.000	23 LHP
a.		<i>LHP Keuangan</i>	1.917.692.000	15 LHP
b.		<i>LHP Kinerja</i>	782.431.000	6 LHP
c.		<i>LHP DTT</i>	254.107.000	2 LHP
4	1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	505.872.000	1 LHP
5	1043.FAF.169	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	382.870.000	30 Laporan
6	1043.FAF.210	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	489.394.000	30 Laporan
7	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	7.776.000	1 Rumusan
8	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	745.871.000	12 Laporan
a.		<i>Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan</i>	174.962.000	
b.		<i>Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan</i>	524.208.000	
c.		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</i>	25.548.000	
d.		<i>Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan</i>	7.617.000	
e.		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD</i>	13.536.000	
9	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	82.543.000	2 SIHPS
10	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	21.622.000	15 Laporan
		Jumlah (1 s.d. 10)	9.316.701.000	286

Tabel 4 Rincian Anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
1	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.577.980.000	21 Laporan
a		<i>Melaksanakan Layanan Tata Usaha</i>	211.911.000	
b		<i>Melaksanakan Layanan Kehumasan</i>	211.126.000	
c		<i>Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia</i>	240.402.000	
d		<i>Melaksanakan Layanan Keuangan</i>	280.499.000	
e		<i>Melaksanakan Layanan Umum dan TI</i>	260.737.000	
f		<i>Melaksanakan Layanan Hukum</i>	268.290.000	

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
g		Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	28.991.000	
h		Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	42.752.000	
i		Menyusun Perangkat Lunak	33.272.000	
	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	707.322.000	2 Unit
2	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	446.040.000	2 Unit
3	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	10.347.290.000	1 Layanan
a		Gaji dan Tunjangan	6.535.912.000	
b		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.811.378.000	
a)		Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	468.063.000	
b)		Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	41.840.000	
c)		Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	181.089.000	
d)		Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	247.200.000	
e)		Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	2.873.186.000	
		Jumlah (1 s.d. 3)	13.078.632.000	26

Tabel 5 Rincian Anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP)

3. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana berikut.

a. Tanah dan Bangunan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

(1) Tanah

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dua bidang tanah seluas 14.808 m² yang terletak pada dua lokasi yaitu:

- a) Seluas 7.162 m² di Jln. G Obos No. 191 diperoleh pada Tahun 2008 digunakan untuk Rumah Jabatan Eselon IV s.d. Eselon II serta Mess Pegawai BPK;

- b) Seluas 7.646 m² di Jln. Yos Sudarso No. 16 diperoleh pada Tahun 2010 digunakan untuk Bangunan Gedung Kantor, Auditorium, Mushola, Gudang dan Kantin.

(2) Bangunan

a) Gedung Kantor

Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terletak di Jln. Yos Sudarso No. 16, mulai ditempati pada Tahun 2010, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tiga lantai, dengan luas bangunan masing-masing lantai yaitu:

- 1) Lantai pertama seluas 864 m²;
- 2) Lantai kedua seluas 966,75 m²;
- 3) Lantai ketiga seluas 962,055 m².



Gambar 4 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

b) Mess Pegawai

Dalam memenuhi kebutuhan prasarana pegawai dan pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, pada Tahun 2013 dibangun Mess 2 lantai, dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 762 m². Fasilitas Mess terdiri atas 16 kamar tidur yang dilengkapi dengan toilet pada masing-masing kamar, dapur, dan lobby.



Gambar 5 Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

c) Rumah Jabatan Kepala Perwakilan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2012 dibangun Rumah Jabatan Kepala Perwakilan, rumah jabatan tersebut terdiri atas dua lantai dengan luas 388 m². Fasilitas Rumah Jabatan Kepala Perwakilan terdiri atas 2 kamar tidur utama, 2 kamar tidur tamu, 1 kamar tidur pembantu, dapur, ruang tamu, ruang makan keluarga, dan garasi.



Gambar 6 Rumah Jabatan Kepala Perwakilan

d) Rumah Jabatan Eselon III dan IV

Hingga tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 10 unit rumah jabatan struktural yang terdiri atas rumah jabatan struktural eselon III sebanyak 3 unit dengan luas masing-masing 105 m² dan struktural eselon IV sebanyak 7 unit dengan luas masing-masing 78 m². Rumah jabatan tersebut dibangun pada tahun 2012.



Gambar 7 Rumah Jabatan Struktural Eselon III



Gambar 8 Rumah Jabatan Struktural Eselon IV

e) Fasilitas Ibadah

Pada tahun 2013, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membangun Gedung Musholla seluas 94 m² yang diberi nama Musholla Al-Baitul Hasib. Musholla tersebut terletak disebelah utara gedung kantor atau berada disamping kantin.



Gambar 9 Musholla BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

f) Auditorium

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Bangunan Gedung Auditorium seluas 414 m² yang dibangun pada Tahun 2012.



Gambar 10 Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

g) Kantin

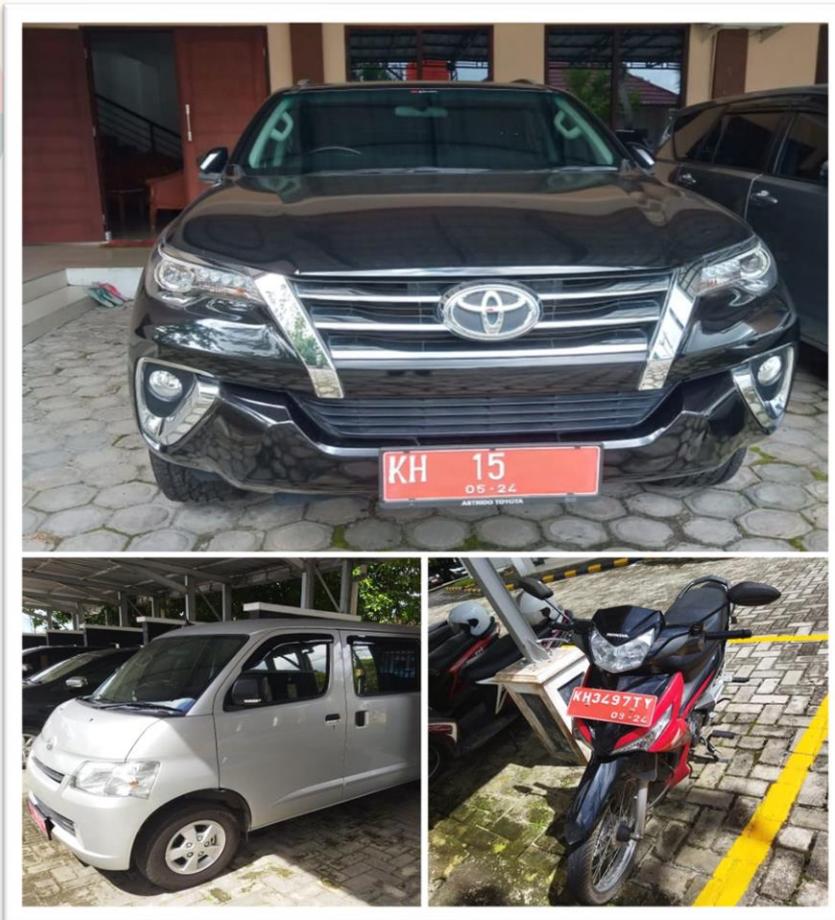
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Bangunan Gedung Kantin seluas 46,5 m² yang diberi nama Kantin Ceria Bujana yang dibangun pada tahun 2013.



Gambar 11 Kantin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

b. Peralatan dan Mesin pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Peralatan dan Mesin disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemeriksaan maupun pelaksanaan tugas penunjang, peralatan dan mesin berupa Alat Angkutan, Alat Besar, Alat Bengkel, Alat Ukur, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Peralatan Komputer, Alat kedokteran dan Alat Komunikasi.



Gambar 12 Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4



Gambar 13 Genset dan Lift BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

c. Jalan dan Jaringan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Jalan Khusus Komplek seluas 518 m² yang terletak pada Lingkungan Rumah Jabatan dan Mess Pegawai. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa instalasi jaringan yang terdiri dari instalasi air bersih/air baku, instalasi air kantor, instalasi pengaman, instalasi lainnya, jaringan listrik, dan jaringan telepon.



Gambar 14 Akses Jalan Rumah Jabatan

d. Aset Tetap Lainnya pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Aset tetap lainnya berada di Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 2.423 buku, 4 atlas, dan 1 lukisan. Hingga tahun 2021, koleksi buku yang tersedia terdiri dari buku ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, kesehatan, kamus, dan beberapa jenis buku referensi lainnya. Koleksi buku ini dapat dipergunakan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024. Isu-isu strategis tersebut itu meliputi:

- a. Berdasarkan laporan *peer review* Tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum kearah *impact*;
- b. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK yang berisiko menurunkan reputasi BPK;
- c. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;
- d. Perlunya peningkatan tata kelola antara lain: penguatan pemeriksaan TI, menyebarkan pengetahuan, penerapan manajemen risiko, independensi anggaran, dan memperkuat *IT Driven* untuk mendukung proses bisnis sesuai hasil *peer review*;
- e. Pengelolaan Pendidikan dan pelatihan (diklat) BPK masih menghadapi permasalahan, antara lain: kualitas dan kuantitas SDM (pengelola dan fasilitator) belum mencukupi, kurikulum belum *link and match*, media pembelajaran belum komprehensif, stakeholder belum sinergis, dan tata Kelola belum optimal;
- f. BPK belum sepenuhnya mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung peningkatan nilai tambah organisasi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 disusun selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 menjabarkan rancangan rencana lima tahunan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Melalui visi ini BPK akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dengan demikian, BPK akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni:

- (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;

- (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Selaras dengan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan "Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat." Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi".

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut, yaitu:

1. Independensi, yaitu BPK menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan. BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi;
2. Integritas, yaitu BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan;
3. Profesionalisme, yaitu BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

b. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 16 Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024

Sasaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI mendukung strategi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif.

Adapun sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 yaitu "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi". Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dua sasaran sebagai berikut.

- 1) Sasaran 1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas;
- 2) Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.

Berikut visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 sebagai berikut.



Gambar 17 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

- Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ;
- Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
- Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
- Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
- Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- Hasil Evaluasi AKIP;
- Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;

- k) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
- l) Tingkat Kinerja Anggaran.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Indikator Kinerja beserta target pencapaian Indikator Kinerja. Indikator Kinerja beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2021. yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Eselon II dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI pada Desember 2020 yang diketahui oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota VI BPK.

Berikut Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021:



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

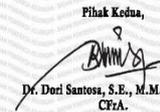
Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp23.394.233.000	1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolesan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Rp10.147.366.000	2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Pengguna	100%
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan Rp13.246.867.000	3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8. Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
	9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
	10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,00)
	12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13. Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

INDIKATOR KINERJA KELUARAN DAN TARGET TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Output	Indikator Rincian Output	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik LHP oleh KAP untuk dan atas Nama BPK Balas Permohonan Tingkat Pemanfaatan Usulan Balas Pendapat Sumbangan IHP Laporan Profil Entitas Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah LHP Interim/Pendahuluan Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan Layanan Sarana Internal Layanan Prasarana Internal Layanan Perkantoran	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Lulus Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Realisasi pembangan Geji dan Tunjangan Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100% 1 Paket 1 Paket 95% 95%

Jakarta, Desember 2020

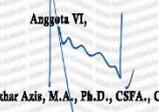
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFA. Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

Diketahui oleh:

Anggota VI,

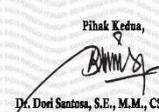
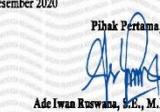
Prof. Harry Azhar Axis, M.A., Ph.D., CSFA., CFA. Ketua,

Wakil Ketua, Ketua,

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CFA., CFAE. Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE.

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFA. Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

Indikator	Ketahu	Catatan
Ketepatan Waktu (rincian output)	Berat waktu sesuai berkutnya ST, XG, PL atau Disposisi Kasan Langsung 100% Penyempitan serambat 5-hari kerja = 95% Penyempitan serambat 5-10 hari kerja = 85% Penyempitan serambat >10 hari kerja = 65%	1. Penilaian dibarengkan secara mandiri. 2. Penilaian didasarkan atas dokumen/lebaran yang disampaikan kepada asran langka ng eselon 2 atau pihak terkait (tidak termasuk LHP atau dokumen lainnya yang sudah dicakar dalam led otor. Sasaran Kegiatan eselon 2 terkait)

Gambar 18 Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Pada Tahun 2021 dilakukan revisi anggaran untuk beberapa keluaran sehingga terjadi perubahan anggaran atas Sasaran Strategis yang tersaji dalam tabel berikut.

Sasaran Strategis	Sasaran	Anggaran	
		Semula	Menjadi
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp10.147.366.000,-	Rp9.316.701.000,-
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp13.246.867.000,-	Rp13.078.632.000,-
Total Anggaran		Rp23.394.233.000,-	Rp22.395.333.000,-

Tabel 6 Revisi Anggaran atas Sasaran Strategis Tahun 2021

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN SKOR INDIKATOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

Pengelolaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Direktorat PSMK melakukan pengukuran secara bertahap dari mulai proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021:

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Skor	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90,63%	90,63
	1.1	Hasil QA dan QC Satker (Bobot 40%)		100%	
	1.2	Hasil Evaluasi EPP (Bobot 50%)		81,25%	
	1.3	Hasil Reviu Itama (Bobot 10%)		100	
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	2.1	Jumlah LHP yang Simpulannya sesuai dengan harapan penugasan		27	
	2.2	Jumlah LHP yang diterbitkan		27	

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Skor
	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	83,11%	105
	3.1 Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti		11.756	
	3.2 Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses		1.914	
	3.3 Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti		499	
	3.4 Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		119	
	3.5 Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee		14.288	
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,38%	100,38
	4.1 Realisasi pemeriksaan tematik nasional		4	
	4.2 Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional		4	
	4.3 Alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan		0,38	
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
	5.1 Jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK		-	
	5.2 Seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa		-	
	5.3 Alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat		-	

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Skor
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,39%	100,39
	6.1 Realisasi pemeriksaan tematik lokal		2	
	6.2 Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal		2	
	6.3 Alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat		0,39	
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,40)	88
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	AA (96,59)	105
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,66%	103,82
	9.1 Tingkat pemanfaatan layanan dasar : e-mail (15%); e-Drive (10%) dan Portal (5%) (Bobot 30%)		98,88%	
	9.2 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum (Bobot 25%)		100%	
	9.3 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan : SMP (15%); SiAP (15%) dan SiPTL (15%) (Bobot 45%)		100%	
	9.4 Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan (*)		100%	
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	170,83%	105
	10.1 Tingkat Penyusunan <i>Best Practice</i> (Bobot 50%)		100%	
	10.2 Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i> (Bobot 25%)		100%	

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Skor
	10.3 Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (Bobot 25%)		383,33%	
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (4,08)	
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
	12.1 Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat		104	
	12.2 Jumlah seluruh pegawai		104	
	13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	91,78%	104,89
	13.1 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)		86,38%	
	13.2 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)		99,88%	
SKOR KINERJA				100,61

Tabel 7 Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2021 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar **100,61**. Skor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2020 yaitu **100,38**. Secara keseluruhan, pencapaian skor kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
 - b. IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.
2. Terdapat tiga Indikator Kinerja sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 2 tentang Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
 - b. IKU 5 tentang Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan;

- c. IKU 12 tentang Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.
3. Terdapat delapan Indikator Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
- a. IKU 3 tentang Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 - b. IKU 4 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
 - c. IKU 6 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
 - d. IKU 8 tentang Hasil Evaluasi AKIP;
 - e. IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
 - f. IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
 - g. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
 - h. IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran.

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SKOR INDIKATOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut:

“Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI merupakan satuan kerja eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran program dalam Perjanjian Kinerja AKN VI sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”

Dalam mendukung sasaran strategis AKN VI tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

“Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Sasaran Strategis
“Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”
pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
Telah Memenuhi Target yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja selama Tahun 2021 secara keseluruhan sebagai berikut.

IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling.

Realisasi capaian IKU 1 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	N/A*	100%	100%
Realisasi	N/A*	86,67%	90,63%
Capaian Realisasi	N/A*	86,67%	90,63%
Perubahan Realisasi	N/A*	-	+3,96%

*) IKU tidak diukur pada Tahun 2019

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Pada Tahun 2021, Realisasi IKU ini sebesar 90,63% dari target 100%. IKU ini diukur melalui tiga sub IKU yaitu Sub IKU 1.1 tentang Hasil QA dan QC Satker (bobot 40%) dengan realisasi sebesar 100%, Sub IKU 1.2 tentang Hasil Evaluasi LHP (bobot 50%) dengan realisasi sebesar 81,25% dan Sub IKU 1.3 tentang Hasil Reviu Itama (bobot 10%) sebesar 100%.

Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) atas 27 Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Pengendalian mutu (*Quality Control*) dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan sesuai dengan kondisinya. Pemerolehan keyakinan mutu (*Quality Assurance*) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan standar dan praktik terbaik internasional dalam pemeriksaan, serta menjadi dasar penilaian atau kriteria atas mutu pemeriksaan untuk kegiatan sebelum sampai dengan setelah pemeriksaan dilakukan.

Selain itu capaian hasil evaluasi LHP yang dilakukan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) sebesar 81,25%. Capaian tersebut terdiri atas tingkat konsistensi atas LHP sebesar 62,50% (terdapat 6 LHP dari 16 LHP yang di evaluasi terdapat temuan konsistensi) dan tingkat akurasi LHP sebesar 93,75% (terdapat 1 LHP dari 16 LHP yang di evaluasi terdapat temuan akurasi).

Adapun capaian hasil reuiu Itama yaitu sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan telah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2020, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 3,96%. Namun, capaian ini masih dibawah target yang diharapkan yaitu 100%. Untuk pencapaian tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian mutu (*Quality Control*) dan pemerolehan keyakinan mutu (*Quality Assurance*) atas setiap Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan.

Dengan demikian IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan 2021.

Berikut akan disajikan perbandingan capaian IKU 1 terhadap target jangka menengah sebagai berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	90,63%	90,63%

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 1 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya berusaha meningkatkan kualitas reuiu

hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU 2 merupakan tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan. Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP.

Realisasi capaian IKU 2 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	N/A*	100%	100%
Realisasi	N/A*	100%	100%
Capaian Realisasi	N/A*	100%	100%
Perubahan Realisasi	N/A*	-	-

*) IKU tidak diukur pada Tahun 2019

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Pencapaian IKU ini pada tahun 2021 sebesar 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan laporan evaluasi Direktorat EPP bahwa simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan 15 Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan, 8 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan 4 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Berikut akan disajikan perbandingan capaian IKU 2 terhadap target jangka menengah sebagai berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 2 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya berusaha untuk meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.

IKU 3 – Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU 3 merupakan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Realisasi capaian IKU 3 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	75%	75%	75%
Realisasi	86,72%	85,32%	83,11%
Capaian Realisasi	115,62%	113,76%	110,81%
Perubahan Realisasi	+8,65%	-1,40%	-2,21%

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Realisasi IKU 3 pada Tahun 2021 menggunakan data per 31 Desember 2021 dimana data realisasi tersebut belum termasuk penambahan tindak lanjut yang telah dibahas dalam pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2021. Sehingga realisasi tersebut bersifat sementara. Pada Semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan percepatan penyelesaian TLRHP secara berkala. Hal ini dilaksanakan karena terdapat kecenderungan penurunan persentase penyelesaian TLRHP setiap periodenya.

Beberapa permasalahan dalam penyelesaian TLRHP diantaranya yaitu.

- 1) Belum tersedianya pengaturan lebih lanjut atas pemberian sanksi pada pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sehingga menyebabkan penyelesaian TLRHP berlarut-larut;
- 2) Pemerintah Daerah tidak segera menindaklanjuti sehingga rekomendasi tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini seperti perubahan struktur organisasi dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Mekanisme penyelesaian TP/TGR di Pemerintah Daerah belum sepenuhnya optimal;
- 4) Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian TLRHP tersebut tidak dapat ditelusuri keberadaannya khususnya untuk rekomendasi-rekomendasi yang sudah lama.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat meningkatkan pencapaian IKU 3 ditahun selanjutnya diantaranya yaitu:

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berperan aktif dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan mengevaluasi permasalahan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan atau yang berlarut-larut melalui program percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. Mendorong Pemerintah Daerah dengan membuat komitmen pencapaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada setiap periode.

Perbandingan realisasi IKU 3 Tahun 2021 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	83,11%	110,81%

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah optimis dapat memenuhi target sampai tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk melakukan evaluasi atas pencapaian dari tahun ke tahun agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara lebih efektif dan efisien.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator kinerja ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional,

sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Pada Tahun 2021, realisasi IKU ini sebesar 100,38 dari target 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan capaian IKU 4 Tahun 2021 terhadap capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	N/A*	100%	100%
Realisasi	N/A*	100,89%	100,38%
Capaian Realisasi	N/A*	100,89%	100,38%
Perubahan Realisasi	N/A*	-	-0,51

*) IKU tidak diukur pada Tahun 2019

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU ini mengalami penurunan sebesar 0,51. Namun demikian, realisasi ini masih diatas target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan dua pemeriksaan tematik nasional yaitu.

1. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya dengan output 1 LHP; dan
2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dengan output 3 LHP.

Berikut perbandingan realisasi IKU 4 Tahun 2021 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,38%	100,38%

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 4 jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. Setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan. Tema pemeriksaan tematik nasional yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan ditetapkan pimpinan BPK. Dari tema tersebut, dilakukan analisis berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Pada Tahun 2021, realisasi IKU ini sebesar 100% dari target 100%. Pada Tahun 2021, tidak ada permintaan pemeriksaan dari pihak pemangku kepentingan sehingga IKU ini tetap merealisasikan 100% sehingga memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 5 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	N/A*	100%	100%
Realisasi	N/A*	100%	100%
Capaian Realisasi	N/A*	100%	100%
Perubahan Realisasi	N/A*	-	-

*) IKU tidak diukur pada Tahun 2019

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU ini pada Tahun 2021 sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Hal dikarenakan tidak ada permintaan dari pemangku kepentingan pada tahun tersebut.

Berikut perbandingan realisasi IKU 5 tahun 2021 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 5 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk dapat responsif dalam memenuhi pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Realisasi IKU ini sebesar 100% dari target 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 6 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 6	Tahun		
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	2019	2020	2021
Target	N/A*	100%	100%
Realisasi	N/A*	100%	100,39%
Capaian Realisasi	N/A*	100%	100,39%
Perubahan Realisasi	N/A*	-	+0,39%

*) IKU tidak diukur pada Tahun 2019

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terlibat dalam 2 pemeriksaan tematik lokal yaitu.

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I TA 2021 pada Pemerintah Kota Palangka Raya dan Instansi Terkait Lainnya; dan
2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlibat dalam pemeriksaan tematik lokal dikarenakan pada tahun tersebut dilakukan *refocusing* anggaran atau penyesuaian anggaran yang berpengaruh terhadap penyesuaian objek pemeriksaan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) TA 2020.

Berikut perbandingan realisasi IKU 6 Tahun 2021 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,39%	100,39%

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 6 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya berupaya menyusun rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'S.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU 7 merupakan Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Untuk menjaga integritas dan kredibilitas kelembagaan BPK RI, perlu dukungan dari seluruh unsur pegawai yang ada di dalam organisasi. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk memahami visi, misi dan nilai

dasar BPK sebagai bahan yang melekat pada dirinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei oleh pihak independent dengan skala sebagai berikut.

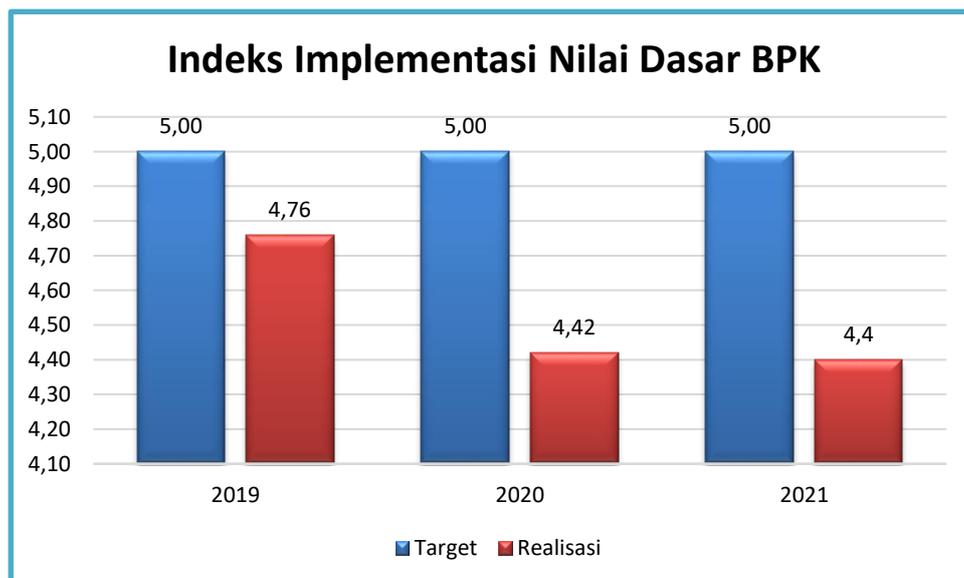
- ✚ 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- ✚ 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- ✚ 3,00 - 3,99 = memuaskan
- ✚ 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 7 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,76	4,42	4,40
Capaian Realisasi	95,20%	88,40%	88%
Perubahan Realisasi	-0,12	-0,34	-0,02

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Jika disajikan dalam bentuk grafik dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 19 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut realisasi ini mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Namun demikian, realisasi IKU 7 pada Tahun 2021 masih dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Atas realisasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan evaluasi dan terus mendorong para pegawai untuk meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK di lingkungan kerja, maupun dalam kehidupan.

Berikut perbandingan realisasi IKU 7 tahun 2021 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,40	88%

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 Terhadap Target Jangka Menengah

Pencapaian IKU ini sampai dengan Tahun 2024 belum memenuhi target Renstra. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk terus mendorong pencapaian IKU ini dengan mengoptimalkan pembinaan pegawai tentang pemahaman visi, misi dan implementasi nilai-nilai dasar.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Indikator ini menunjukkan pengukuran atau evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Tujuan dari dilakukannya pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Pengukuran indikator ini sesuai dengan PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, di mana nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)

- ✚ CC = Cukup (>50-60)
- ✚ C = Kurang (>30-50)
- ✚ D = Sangat Kurang (0-30)

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 8 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	AA	A (86,00)	A (87,00)
Realisasi	A	AA (94,39)	AA (96,59)
Capaian Realisasi	90%	109,76%	111,02%
Perubahan Realisasi	+10,17	+5,49	+2,2

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi IKU ini mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dari tahun ke tahun atas rekomendasi yang disampaikan Itama. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mempertahankan capaian target setiap tahunnya dengan terus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Itama.

Berikut perbandingan realisasi IKU 8 tahun 2021 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	AA (96,59)	107,26%

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 8 sampai dengan Tahun 2024 telah memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun-tahun selanjutnya, dengan memperhatikan

rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan sehingga tersaji informasi yang informatif dan relevan.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 9 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	95%	95%	96%
Realisasi	98,99%	99,16%	99,66%
Capaian Realisasi	104,2%	104,38%	103,81%
Perubahan Realisasi	+7,28%	+0,17%	+0,5%

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

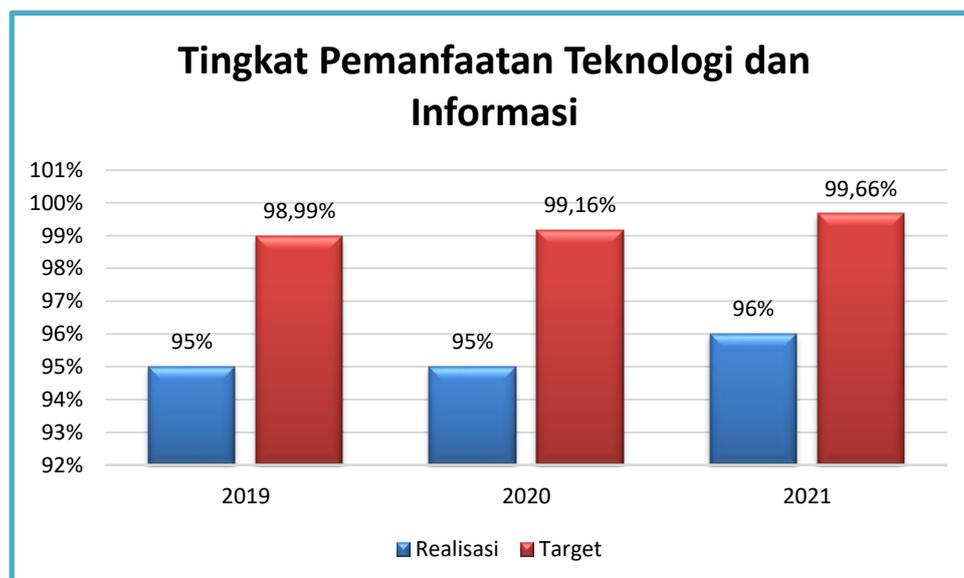
Berdasarkan tabel diatas, Realisasi IKU 9 tahun 2021 secara realisasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun secara capaian realisasi mengalami penurunan sebesar 0,57%. Hal ini dikarenakan target pencapaian IKU ini pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 96%. Meskipun demikian, realisasi

tersebut masih mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan kesadaran tinggi pegawai dalam memanfaatkan layanan teknologi dan informasi dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada Tahun 2021 tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 99,66% dengan rincian Sub IKU sebagai berikut.

- a. Realisasi Sub IKU 9.1 tentang Tingkat pemanfaatan layanan dasar: e-mail (15%); e-Drive (10%); Portal (5%) sebesar 98,88% (Bobot 30%);
- b. Realisasi Sub IKU 9.2 tentang Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM sebesar 96,64% (Bobot 25%);
- c. Realisasi Sub IKU 9.3 tentang Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: SMP (15%); SiAP (15%); SiPTL (15%) sebesar 100% (Bobot 45%);
- d. Sub IKU 9.4 Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan. Pada Tahun 2021 Sub IKU ini belum diukur pemanfaatannya karena masih dalam proses pembangunan.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik dapat disajikan sebagai berikut.



Gambar 20 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berikut perbandingan realisasi IKU 9 Tahun 2021 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	99,66%	99,66%

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 9 pada Tahun 2021 belum memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi setiap tahunnya dengan meningkatkan kesadaran pegawai baik dalam hal kualitas layanan TIK sendiri maupun dengan melaksanakan sosialisasi pemanfaatan aplikasi teknologi informasi kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah serta membuka layanan tanya jawab dan bantuan konsultasi tingkat pemanfaatan TI. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara menyeluruh pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode- metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reuiu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 10 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	N/A*	100%	100%
Realisasi	N/A*	200%	170,83%
Capaian Realisasi	N/A*	200%	170,83%
Perubahan Realisasi	N/A*	-	-29,17%

*) IKU tidak diukur pada Tahun 2019

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Pada Tahun 2021, realisasi IKU 10 tentang Tingkat Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebesar 170,83% atau diatas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas realisasi IKU ini mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020. Namun demikian, terjadi peningkatan jumlah aktivitas manajemen pengetahuan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2021.

Adapun pencapaian realisasi ini berdasarkan atas realisasi Sub IKU berikut.

- a.** Realisasi Sub IKU 10.1 tentang Tingkat Penyusunan *Best Practice* sebesar 100%. Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah menyusun *best practice* yang berjudul "**Formulir Terpadu Administrasi Pemeriksaan (For-TAP)**". *Best practice* ini merupakan sebuah aplikasi yang berupa sebuah *file sharing* yang mengintegrasikan Subbagian Humas dan TU Kalan, Subbagian SDM, dan Subauditorat dalam menyusun dokumen administrasi pemeriksaan.
- b.** Realisasi Sub IKU 10.2 tentang Tingkat Penerapan *best practice* sebesar 100%. Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penerapan *best practice* yang berjudul "**Model Pengelolaan Pusat Informasi dan Komunikasi Berbasis Data Terpadu sebagai Bentuk Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat pada BPK Perwakilan NTB**". Alasan pemilihan *best practice* ini yaitu dalam rangka mengefektifkan peran PPID dan Pengelola PIK dalam mengelola administrasi dokumen informasi publik.
- c.** Realisasi Sub IKU 10.3 tentang Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP) sebesar 383,33%. Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 23 aktivitas Manajemen Pengetahuan diantaranya yaitu:
 - Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 1 aktivitas;
 - Bantuan Rekan Sejawat (*Peer Assist*) sebanyak 1 aktivitas;
 - Coaching sebanyak 1 aktivitas;
 - Wawancara Berbasis Pengetahuan sebanyak 12 aktivitas;
 - Mentoring sebanyak 1 aktivitas;
 - Evaluasi kegiatan sebanyak 2 aktivitas;
 - Forum Berbagi Pengetahuan sebanyak 2 aktivitas;
 - Komunitas Praktisi sebanyak 1 aktivitas;
 - Reviu Pasca Aktivitas sebanyak 2 aktivitas.

Jumlah aktivitas ini jika dibandingkan dengan jumlah Tahun 2020 mengalami kenaikan dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah secara rutin melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan di setiap triwulannya.

Berikut perbandingan realisasi IKU 10 Tahun 2021 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	170,83%	170,83%

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 10 pada Tahun 2021 telah memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mempertahankan capaian IKU ini dengan melakukan aktivitas manajemen pengetahuan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK. Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

IKU ini berdasarkan hasil survei pengukuran indikator yang dilaksanakan oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal.

Pengukuran dilakukan menggunakan skala berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 11 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	N/A*	3,8	3,8
Realisasi	N/A*	3,96	4,08
Capaian Realisasi	N/A*	104,21%	107,37%
Perubahan Realisasi	N/A*	-	+0.12

*) IKU tidak diukur pada Tahun 2019

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Pada Tahun 2021, realisasi IKU ini sebesar 4,08 (sangat memuaskan) atau mengalami peningkatan sebesar 0,12 jika dibandingkan realisasi Tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas komunikasi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemangku kepentingan.

Berikut perbandingan realisasi IKU 11 Tahun 2021 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,8	3,8	3,8	3,8	4,08	107,37%

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 11 pada Tahun 2021 telah memenuhi target Renstra sampai dengan tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan,

kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar pengembangan kompetensi di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut.

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September 2021. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September 2021, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September 2021, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 12 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian Realisasi	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi	-	-	-

Tabel 30 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 12 dalam tiga tahun terakhir memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 terdapat 104 pegawai dari 104 pegawai yang telah memenuhi standar jam pelatihan. Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2021 untuk dapat memenuhi

pencapaian IKU ini, yaitu dengan melaksanakan diklat mandiri di Kantor Perwakilan dan mengikutsertakan pegawai pemeriksa maupun non pemeriksa dalam diklat di Badan Diklat secara *distance learning*.

Berikut perbandingan realisasi IKU 12 Tahun 2021 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 12 sampai dengan Tahun 2021 telah memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. Dalam upaya mempertahankan pencapaian IKU 12 untuk setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berperan aktif dalam mengikutkan pegawai pemeriksa mengikuti diklat mandiri maupun diklat di Badan Diklat.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator ini menunjukkan tingkat optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Indikator ini mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran;
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
3. Pencapaian keluaran;
4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Cakupan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) meliputi EKA Reguler dan EKA Nonreguler sebagai salah satu instrument penerapan berbasis kinerja.

Pelaksanaan EKA Reguler di lingkungan BPK dilaksanakan untuk kinerja anggaran pada tingkatan:

1. Tingkat Lembaga yang mengukur pada aspek manfaat dan aspek konteks;
2. Tingkat unit eselon I yang mengukur aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks;
3. Tingkat satuan kerja yang mengukur aspek implementasi.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 13 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	N/A*	87%	87,5%
Realisasi	N/A*	92,62%	91,78%
Capaian Realisasi	N/A*	106,46%	104,89%
Perubahan Realisasi	N/A*	-	-0,99%

*) Pada Tahun 2019 hanya Nilai EKA yang diukur

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 13 pada Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan pada Tahun 2020 dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) untuk komponen Rencana Penarikan Anggaran (RPD) tidak diukur sehingga nilai EPA dapat optimal sebesar 100%. Namun demikian, Realisasi IKU 13 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dikarenakan formulasi pengukuran yang berbeda.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebesar 86,38% atau dalam kategori **Baik**. Adapun rincian nilai tersebut sebagai berikut.

1. Penyerapan anggaran sebesar 98,85%;

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Bobot pengukuran sebesar 9,7%.

2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 99,85%

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Bobot pengukuran sebesar 18,2%.

3. Pencapaian keluaran sebesar 100%;

Pencapaian keluaran merupakan perbandingan antara pencapaian keluaran dengan target keluaran baik pada volume keluaran kegiatan dan indikator kinerja keluaran. Bobot pengukuran sebesar 4,50%.

4. Efisiensi sebesar 52.87%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Bobot pengukuran sebesar 28,6%.

Atas nilai EKA tersebut dan untuk perbaikan kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian dan menyusun rencana aksi penanganan;
- b. Memperhatikan capaian target Rincian Ouput yang masih dinilai rendah sebagai perbaikan tahun selanjutnya;
- c. Memastikan pencapaian Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan sesuai komitmen;
- d. Memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, waktu, sarana prasarana dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK;
- f. Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam peningkatan kinerja satker.

Adapun nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 99,88%. Adapun rincian nilai tersebut sebagai berikut.

- a. Revisi DIPA sebesar 100. Nilai ini menunjukkan pengajuan revisi DIPA dalam batas kewajaran.
- b. Deviasi halaman III DIPA sebesar 98,16. Deviasi dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan realisasi anggaran terhadap RPD. Deviasi halaman III DIPA BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 telah baik dengan rasio penyimpangan hanya 1,84%.

- c. Pagu minus sebesar 100. Nilai ini menunjukkan tidak ada pagu minus pada pelaksanaan anggaran.
- d. Data Kontrak sebesar 100. Nilai ini menunjukkan penyampaian data kontrak tepat waktu.
- e. Pengelolaan UP dan TUP sebesar 100. Nilai ini menunjukkan pengelolaan UP dan TUP yang optimal.
- f. LPJ Bendahara sebesar 100. Nilai ini menunjukkan penyampaian LPJ Bendahara yang tepat waktu.
- g. Dispensasi SPM sebesar 100. Nilai ini menunjukkan penyampaian SPM dalam batas waktu yang ditentukan.
- h. Penyerapan anggaran sebesar 100. Nilai ini menunjukkan penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan target ideal.
- i. Penyelesaian tagihan sebesar 100. Nilai ini menunjukkan penyelesaian tagihan dalam batas waktu yang ditentukan.
- j. Capaian output sebesar 100. Nilai ini menunjukkan output keseluruhan tercapai.
- k. Retur SP2D sebesar 99,47. Pada Tahun 2021, terdapat 1 SP2D yang diretur.
- l. Perencanaan Kas sebesar 0. Nilai ini menunjukkan perencanaan kas yang akurat.
- m. Kesalahan SPM sebesar 100. Nilai ini menunjukkan pengajuan SPM yang benar.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam upaya perbaikan atas nilai EPA ini dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, mereview kembali rencana kegiatan dan melakukan indentifikasi risiko-risiko yang menghambat pencapaian kinerja serta menyusun rencana aksi penanganan risiko dalam pelaksanaan anggaran.
- b. Aspek kepatuhan atas regulasi, meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, penyampaian LPJ bendahara, serta penyelesaian tagihan tepat waktu.
- c. Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan, meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM untuk menghindari retur SP2D, merealisasikan anggaran

- secara proporsional sesuai target penyerapan triwulanan dan memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Pegawai.
- d. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran, ketepatan waktu dalam penyampaian perencanaan kas dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN.
 - e. Memantau capaian IKPA secara berkala melalui OM SPAN, agar dapat segera melaksanakan langkah-langkah strategis peningkatan aspek kinerja.
 - f. Berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN mitra kerja setempat, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

Berikut perbandingan realisasi IKU 13 Tahun 2021 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%	91,78%	104,89%

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Terhadap Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU sampai dengan Tahun 2024 telah memenuhi target Renstra. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Menteri Keuangan menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi factor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

1. Data capaian Keluaran (*output*) Program;
2. Data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;
3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran.

Pengukuran efisiensi dihitung berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Tahun 2021, nilai efisiensi atas kinerja anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 52,87%. Nilai ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori telah melakukan efisiensi terhadap pemakaian anggaran dalam rangka pencapaian keluaran.

D. REALISASI SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, diperlukan dukungan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dukungan anggaran tersebut dapat dilihat jika menjabarkan Indikator Kinerja Keluaran (IKK) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	3.898.944.000	3.887.775.226	99,71%
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	227.579.000	227.265.500	99,86%
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	505.872.000	496.709.008	98,19%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	7.776.000	7.065.955	90,87%
		Sumbangan IHPS Perwakilan	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	82.543.000	79.236.199	95,99%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	21.622.000	21.284.400	98,44%
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	382.870.000	382.828.500	99,99%
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian ganti Kerugian Negara atau Daerah	489.394.000	470.502.575	96,14%
		LHP Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	2.954.230.000	2.952.755.318	99,95%
		Layanan Administrasi Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	745.871.000	735.799.349	98,65%
Total Strategi Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas				9.316.701.000	9.261.222.030	99,40%
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Manajemen Internal Pemeriksaan	1.577.980.000	1.566.149.559	99,25%
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	707.322.000	670.025.000	94,73%
		Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	446.040.000	445.665.880	99,92%
		Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.535.912.000	6.476.376.705	99,09%
			Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.952.511.000	3.761.182.253	95,16%
Total Strategi Meningkatnya Layanan Pemeriksaan				13.078.632.000	12.930.631.361	98,87%
Total Sasaran Kegiatan/Sasaran Strategis				22.395.333.000	22.191.853.391	99,09%

Tabel 34 Indikator Kinerja Keluaran beserta Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

Sasaran Strategis "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi"
Sasaran Strategis ini didukung anggaran sebesar Rp22.395.333.000,00 dan merealisasikan anggaran sebesar Rp22.191.853.391,00 atau sebesar 99,09%

Sasaran "Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas"
 Sasaran ini didukung anggaran sebesar Rp9.316.701.000,00 dan merealisasikan anggaran sebesar Rp9.261.222.030,00 atau sebesar 99,40%

Sasaran "Meningkatnya Layanan Pemeriksaan"
 Sasaran ini didukung anggaran sebesar Rp13.078.632.000,00 dan merealisasikan anggaran sebesar Rp12.930.631.361,00 atau sebesar 98,87%

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 616 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp22.395.333.000,00. Anggaran ini terbagi ke dalam anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp9.316.701.000,00 dan anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp13.078.632.000,00.

Berikut tabel anggaran dan realisasi RKP dan RKSP Tahun 2021.

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	%
1	1043.FAF.036	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	3.898.944.000	26 LHP	3.887.775.266	99,71%
a.		<i>LHP Keuangan</i>	<i>1.963.970.000</i>	<i>14 LHP</i>	<i>1.962.761.265</i>	<i>99,94%</i>
b.		<i>LHP Kinerja</i>	<i>1.114.461.000</i>	<i>8 LHP</i>	<i>1.108.792.491</i>	<i>99,49%</i>
c.		<i>LHP DTT</i>	<i>820.513.000</i>	<i>4 LHP</i>	<i>816.221.470</i>	<i>99,48%</i>
2	1043.FAF.071	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	227.579.000	146 LHP	227.265.500	99,86%
3	1043.FAF.251	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	2.954.230.000	23 LHP	2.952.755.318	99,95%
a.		<i>LHP Keuangan</i>	<i>1.917.692.000</i>	<i>15 LHP</i>	<i>1.917.390.032</i>	<i>99,98%</i>
b.		<i>LHP Kinerja</i>	<i>782.431.000</i>	<i>6 LHP</i>	<i>781.693.676</i>	<i>99,91%</i>
c.		<i>LHP DTT</i>	<i>254.107.000</i>	<i>2 LHP</i>	<i>253.671.610</i>	<i>99,83%</i>
4	1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	505.872.000	1 LHP	496.709.008	98,19%

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	%
5	1043.FAF.169	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	382.870.000	30 Laporan	382.828.500	99,99%
6	1043.FAF.210	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	489.394.000	30 Laporan	470.502.575	96,14%
7	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	7.776.000	1 Rumusan	7.065.955	90,87%
8	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	745.871.000	12 Laporan	735.799.349	98,65%
a.		<i>Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan</i>	<i>174.962.000</i>		<i>167.529.527</i>	<i>95,75%</i>
b.		<i>Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan</i>	<i>524.208.000</i>		<i>523.484.014</i>	<i>99,86%</i>
c.		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</i>	<i>25.548.000</i>		<i>25.529.740</i>	<i>99,93%</i>
d.		<i>Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan</i>	<i>7.617.000</i>		<i>7.580.000</i>	<i>99,51%</i>
e.		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD</i>	<i>13.536.000</i>		<i>11.676.068</i>	<i>86,26%</i>
9	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	82.543.000	2 SIHPS	79.236.199	95,99%
10	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	21.622.000	15 Laporan	21.284.400	98,44%
Jumlah (1 s.d. 10)			9.316.701.000	286	9.261.222.030	99,40%

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi RKP Tahun 2021

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	%
1	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.577.980.000	21 Laporan	1.566.149.559	99,25%
a		<i>Melaksanakan Layanan Tata Usaha</i>	<i>211.911.000</i>		<i>209.026.357</i>	<i>98,64%</i>
b		<i>Melaksanakan Layanan Kehumasan</i>	<i>211.126.000</i>		<i>210.912.579</i>	<i>99,90%</i>
c		<i>Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia</i>	<i>240.402.000</i>		<i>238.113.403</i>	<i>99,05%</i>
d		<i>Melaksanakan Layanan Keuangan</i>	<i>280.499.000</i>		<i>278.245.836</i>	<i>99,20%</i>
e		<i>Melaksanakan Layanan Umum dan TI</i>	<i>260.737.000</i>		<i>259.995.816</i>	<i>99,72%</i>
f		<i>Melaksanakan Layanan Hukum</i>	<i>268.290.000</i>		<i>266.085.322</i>	<i>99,18%</i>

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	%
g		Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	28.991.000		28.954.990	99,88%
h		Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	42.752.000		41.994.156	98,23%
i		Menyusun Perangkat Lunak	33.272.000		32.821.100	98,64%
	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	707.322.000	2 Unit	670.025.000	94,73%
2	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	446.040.000	2 Unit	445.665.880	99,92%
3	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	10.347.290.000	1 Layanan	10.248.790.922	99,05%
a		Gaji dan Tunjangan	6.535.912.000		6.476.376.705	99,09%
b		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.811.378.000		3.772.414.217	98,98%
a)		Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	468.063.000		464.331.298	99,20%
b)		Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	41.840.000		41.840.000	100%
c)		Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	181.089.000		179.933.604	99,36%
d)		Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	247.200.000		246.480.000	99,71%
e)		Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	2.873.186.000		2.839.829.315	98,84%
		Jumlah (1 s.d. 3)	13.078.632.000	26	12.930.631.361	98,87%

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi RKSP Tahun 2021

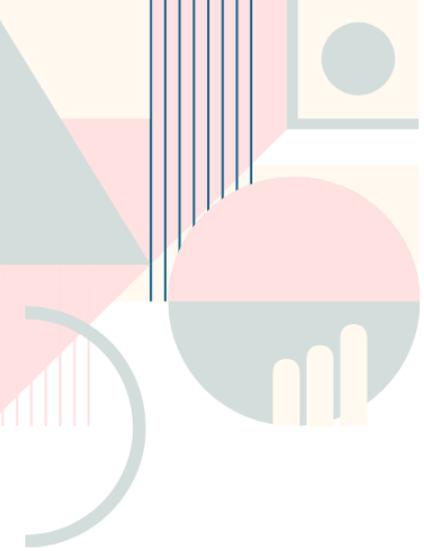
BAB IV – PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

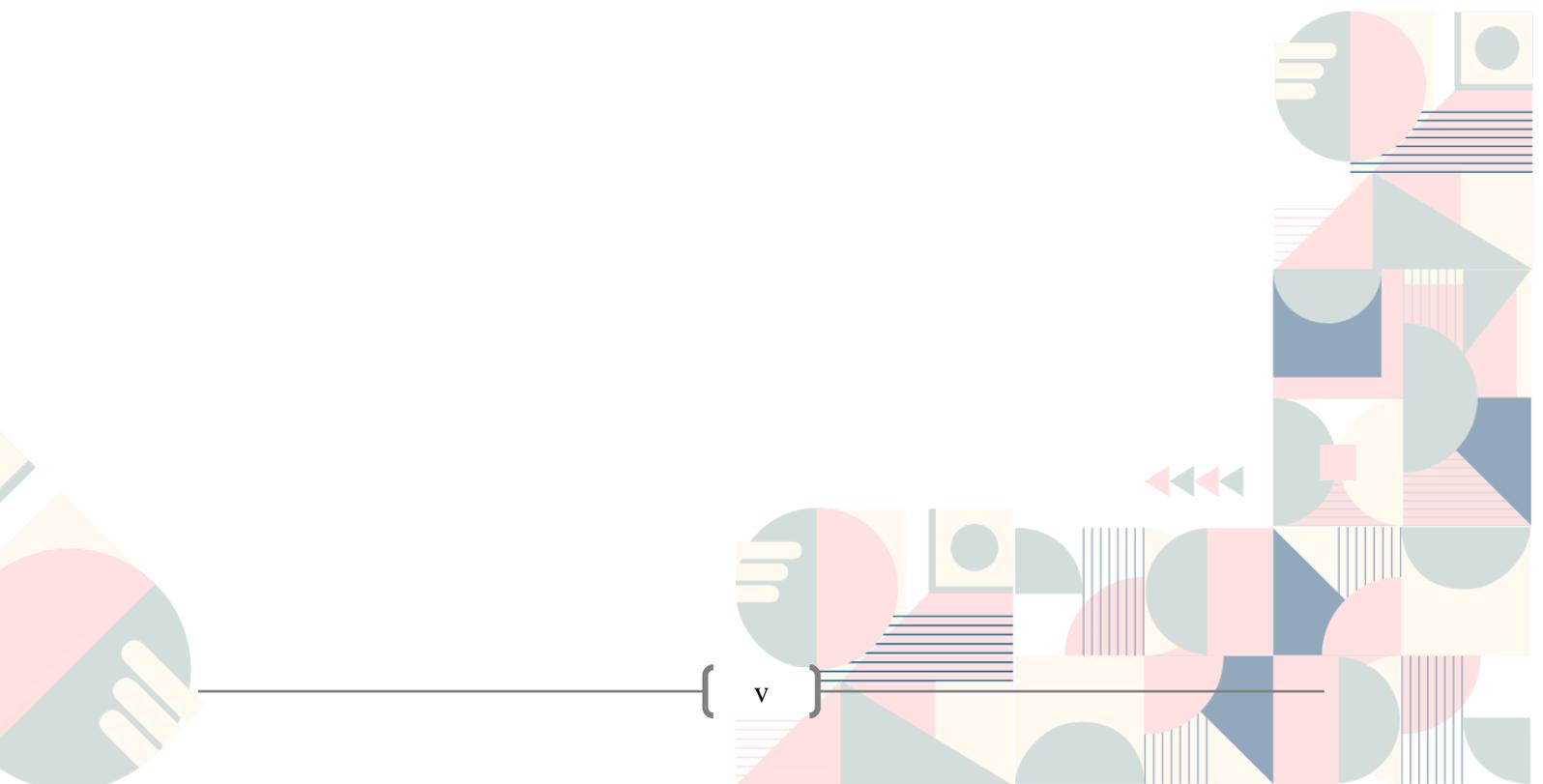
Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebesar 100,61 atau mengalami kenaikan dari periode Tahun 2020 sebesar 100,38. Pencapaian ini menunjukkan sasaran strategis “Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi” telah tercapai.

Indikator kinerja yang telah mencapai target ataupun diatas target sebanyak 11 indikator dan 2 Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk indikator kinerja yang telah mencapai target, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mempertahankan pencapaian dari tahun ke tahun dengan menerapkan rencana aksi yang telah disusun. Untuk Indikator Kinerja yang belum mencapai target BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya-upaya perbaikan dengan memanfaatkan evaluasi tahun ini untuk perbaikan tahun kedepannya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini semoga bermanfaat untuk perbaikan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranan BPK RI dimasa yang akan datang.



LAMPIRAN



Lampiran 1

Tabel Target Pencapaian Kinerja Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
<p>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%

**Format Formulir Pengukuran Kinerja
Tingkat Satuan Kerja Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan**

**Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran : 2021**

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100% 90,63%	
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100% 100%	
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75% 83,11%	
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100% 100,38%	
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100% 100%	
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100% 100,39%	
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,40)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	AA (96,59)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95% 99,66%	
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100% 170,83%	
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (4,08)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100% 100%	
	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87% 91,78%	

Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp22.395.333.000,00
Realisasi Anggaran Tahun 2021 : Rp22.191.853.391,00